

DAFTAR PUSTAKA

- Chorib, S., Boedirijanto, & Pardede, A. (2005). *Pengurusan Piutang Negara*. BPPK.
- Fauzia, M.(2020,12.04). *<https://money.kompas.com/read/2020/12/04/172416426/kemen-keu-piutang-negara-di-kementerian-lembaga-dan-pemda-capai-rp-7513-triliun>*.
From <https://kompas.com>: <https://kompas.com>
- Pemerintah Republik Indonesia. 1960. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 1 tentang Perbendaharaan Negara*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. *Peraturan Pemerintah Nomor 29 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17T tentang Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240 tentang
Pengurusan Piutang Negara. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263
tentang Perubahan atas PMK Nomor 170/PMK.01/2012 Tentang Organisasi
dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. 2018. Undang-Undang Nomor 9 tentang Penerimaan
Negara Bukan Pajak. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. 2019. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 Tentang
Perubahan atas PMK 69/PMK.06/2014 Tentang Penentuan Kualitas Piutang dan
Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian
Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. 2020. Peraturan Pemerintah Nomor 62 tentang Perubahan
atas PP Nomor 3 tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan. Jakarta: Sekretariat
Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. 2021. Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber daya mineral.
Jakarta: Sekretariat Negara.

Santoso, Y. I. (2019, 07 21). <https://nasional.kontan.co.id/news/kementerian-esdm-punya-piutang-rp-146-triliun-yang-belum-tertagih-ini-kata-kemkeu>. From <https://kontan.co.id>: <https://kontan.co.id>

Sukmalalana, & Ridwan, N. M. (2020). Optimalisasi Pengelolaan Piutang PNBPN pada
Kementerian ESDM. Jakarta: Sekretariat Jenderal RI.